

Daftar Produk Hukum Komisi Informasi Pusat

Dokumen ini berisi daftar peraturan, keputusan, dan surat edaran yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Produk hukum ini menjadi dasar penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Peraturan Komisi Informasi (PerKI):

Nomor & Tahun	Tentang
PerKI No. 1 Tahun 2021	Standar Layanan Informasi Publik
PerKI No. 1 Tahun 2019	Sengketa Informasi Pemilu
PerKI No. 1 Tahun 2018	Layanan Informasi Publik Desa
PerKI No. 1 Tahun 2017	Pengklasifikasian Informasi Publik
PerKI No. 1 Tahun 2016	Mediator Pembantu
PerKI No. 2 Tahun 2016	Tata Cara Pemeriksaan Setempat
PerKI No. 1 Tahun 2014	Sengketa Informasi Pemilu
PerKI No. 1 Tahun 2013	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PerKI No. 2 Tahun 2013	Kode Etik
PerKI No. 1 Tahun 2012	Tata Tertib Komisi Informasi Pusat
PerKI No. 2 Tahun 2010	Prosedur Penyelesaian Sengketa
PerKI No. 1 Tahun 2010	Standar Layanan Informasi Publik (dicabut)

Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat:

Nomor	Tentang
No. 02/KEP/KIP/II/2014	Perubahan Keputusan sebelumnya
No. 03/KEP/KIP/I/2013	Penunjukan PPID KI Pusat
No. 06/KEP/KIP/VIII/2013	Gugus Tugas Komisioner
Lainnya	Keputusan tentang penghentian pemeriksaan, pendelegasian tugas, kode etik internal

Surat Edaran Komisi Informasi Pusat:

Nomor	Tentang
SE No. 02/KIP-SE/VI/2014	Tindak Lanjut Sengketa Informasi Publik (kewenangan relatif)
SE No. 01/KIP-SE/IV/2014	Pelaksanaan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2014
SE Tahun 2012	Tindak Pidana dalam KIP
SE Tahun 2012	Pedoman Sementara Honorarium
SE No. 81A/KIP/VI/2011	Plat Merah Kendaraan Dinas

SE No. 1 Tahun 2011	RKA/L dan DIPA sebagai informasi publik wajib diumumkan
---------------------	---

Daftar produk hukum di atas menunjukkan dasar-dasar hukum yang digunakan Komisi Informasi Pusat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Produk hukum ini menjadi pedoman dalam layanan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi, serta penguatan tata kelola transparansi di Indonesia.